

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat dalam sektor perekonomian melahirkan perjanjian-perjanjian baru dalam masyarakat, salah satunya adalah perjanjian kredit oleh perbankan bagi pemberian modal usaha. Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai keabsahan dan dampak hukum dari pencantuman klausula eksonerasi dalam Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) Bank BNI Wilayah Semarang. Dengan landasan asas kebebasan berkontrak, kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ketidakseimbangan kekuatan antara kreditur dan debitur serta dampaknya terhadap prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Klausula eksonerasi, yang memberikan keleluasaan kepada Bank BNI untuk melepaskan tanggung jawab atas tindakan-tindakan tertentu, menjadi fokus analisis dalam konteks legalitas dan implikasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif yang bersifat deskriptif, dengan pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan analisis penulisan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sementara klausula tersebut dapat memberikan perlindungan hukum bagi bank, namun juga dapat melanggar prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Temuan ini memberikan kontribusi pada pemahaman tentang kompleksitas hukum dalam perjanjian kredit bank dan pentingnya mempertimbangkan aspek keadilan serta perlindungan konsumen dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan rekomendasi bagi Bank BNI untuk mempertimbangkan ulang penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian kreditnya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.

Kata Kunci : Perjanjian kredit, Klausula eksonerasi, Asas kebebasan berkontrak, Keabsahan hukum, Bank BNI.

ABSTRACT

The development of society in the economic sector has given rise to new agreements within the community, one of which is credit agreements by banks for business capital provision. This study examines the issues of the validity and legal impact of the inclusion of exoneration clauses in the Working Capital Credit (KMK) Agreement of Bank BNI Semarang Region. Based on the principle of freedom of contract, this study aims to analyze the potential imbalance of power between creditors and debtors and its impact on the principles of justice and consumer protection. The exoneration clause, which allows Bank BNI to relinquish responsibility for certain actions, is the focus of analysis in terms of legality and implications. The research method used is a descriptive juridical-normative legal research method, with data collection through literature studies and deductive writing analysis. The research results indicate that while the clause can provide legal protection for the bank, it may also violate consumer protection principles and lead to serious legal consequences. These findings contribute to the understanding of legal complexities in bank credit agreements and the importance of considering justice and consumer protection aspects in such agreements. Therefore, this study provides recommendations for Bank BNI to reconsider the use of exoneration clauses in its credit agreements to comply with applicable legal provisions and justice principles.

Keywords : Credit agreements, Exoneration clauses, Freedom to contract, Legal validity, Bank BNI.